

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 1862, sejak bangsa Belanda yang bernama Neunheys di ijin Sultan Mahmud membuka perkebunan tembakau disekitar Titi Papan dekat Labuhan, suku bangsa Karo merasa terancam oleh ekspansi kolonial Belanda dan sejak mulai tahun 1872, secara terang-terangan melakukan ekspansi ke seluruh dataran tinggi Karo secara terus- menerus sampai tahun 1907.

Begitu juga setelah gugurnya Panglima Nabung Surbakti tahun 1907 dan hancurnya Pasukan Panglima Kiras Bangun bersama seluruh pasukan-pasukan Silimin Sibayak Baturaden yang bermarga Sinulingga, barulah Pemerintah Belanda merasa Aman di daerah Karo. Sewaktu Belanda datang, masyarakat suku karo masih merupakan masyarakat yang murni tradisional. Susunan prekonomian dan kebudayaan masih bersifat agraris. Kondisi tanah yang subur menyebabkan masyarakatnya bersifat berswasembada. Hanya beberapa jenis kebutuhan yang dimasukkan dari daerah luar seperti Garam, sedangkan kebutuhan lainnya diproduksi hanya untuk kebutuhan sendiri.

Begitupun dalam hal perdagangan, hampir tidak dikenal. Walaupun ada, hanya dalam bentuk barter saja. Jenis dan jumlah kebutuhan yang tidak pernah bertambah, inilah yang menyebabkan masyarakat menjadi statis. Anggota masyarakat menerima keadaan yang statis ini sebagai suatu hal yang wajar. Perubahan ke arah yang lebih baik, maupun kemungkinan ke arah itu tidak pernah terpikirkan.

Setelah mengalami kontak dengan Belanda, pandangan masyarakat Karo lebih terbuka. Kedatangan Belanda sendiri membawa serta perubahan sosial yang bersifat fundamental, terutama dalam bidang pemerintahan dengan digesernya kekuasaan dari tangan masyarakat Suku Karo ke tangan pemerintahan Belanda. Perubahan lainnya yang diadakan Belanda hanyalah dalam rangka penegakan kekuasaan pemerintah Kolonial di seluruh dataran tinggi Karo. Namun dalam perubahan tersebut, terselip pula benih-benih perubahan yang pada waktunya kelak akan berkembang menjadi perubahan yang membawa manfaat kepada masyarakat Karo seperti dibukanya Jalan- jalan seperti jalan Kabanjahe- Medan.

Jauh sesudah pemerintah Kolonial Belanda menjalankan kekuasaan di Tanah Karo, yaitu mulai 1911, barulah pemerintah Belanda menjalankan penetapan batas-batas Administrasi Pemerintahan sejalan dengan dengan siasat Politik *Divide ed Impera* yaitu dengan memecah belah masyarakat suku Karo.

Dalam menjalankan siasatnya tersebut, maka di Tanah Karo dibentuk sistem Sibayak. Di mana yang diberi gelar Sibayak inilah yang menjadi kepala ataupun pemimpin di daerahnya. Sistem ini lebih dikenal dengan Raja Berempat dimana ada empat Sibayak yaitu Sibayak Lingga yang kedudukannya di kampung Lingga, Sibayak Suka yang kedudukannya di kampung Suka, Sibayak Barus Jahe kedudukannya di kampung Barus Jahe, Sibayak Sarinembah berkedudukan di kampung Sarinembah. Masing- masing Sibayak ini juga memiliki luas kekuasaan yang berbeda pula.

Susunan pemerintahan di Tanah Karo pada masa penjajahan Belanda disebut Onder Afdeling Tanah Karo yang diperintah oleh seorang konteler yang

dibantu oleh seorang Aspiran Konteler dari pegawai Gurbenmen yang membawahkan Raja Berempat atupun lebih dikenal dengan Sibayak. Para Sibayak ini, membawahi beberapa Raja Urung dan Raja Urung mengepalai suatu daerah Urung. Di bawah raja Urung terdapat Pengulu-pengulu Kesain di tiap-tiap kampung, dan dari pengulu kampung inilah baru sampai ke pemerintahan paling kecil yaitu masyarakat suku Karo

Dari uraian diatas terlihat bahwa Belanda memecah masyarakat suku Karo dengan politik *Devide ed Impera*. Pemerintah Kolonial Belanda mempunyai konsep bahwa suku Bangsa Karo itu harus dipecah-pecah supaya keutuhan pola kebudayaan Panca Marga atau Marga Silima itu dapat di obrak-abrik sampai hancur dan diperbaharui dengan pola kebudayaan baru yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa penjajah.

Tata susila Karo yang mencerminkan kepribadin yaang jujur dan anti segala bentuk penjajahan, yang menurut pemerintah Belanda harus direvisi dengan segala cara dan siasat supaya masyarakat Karo setidak-tidaknya jinak terhadap penjajahan Belanda. Itulah siasat politik kolonial Belanda pada jaman tempo dulu guna memecah-belah masyarakat Karo.

Dari semua hal tersebut, maka penulis merasa tertarik akan membahas mengenai bagaimana sebenarnya sistem Sibayak di Tanah Karo pada masa Kolonial Belanda dan mengapa sistem ini hilang setelah kemerdekaan 1945. Oleh karena itu, maka peneliti mengangkat judul penelitian **PENGHAPUSAN SISITEM SIBAYAK PADA STRUKTUR PEMERINTAHAN MAYARAKAT SUKU KARO 1946-1947.**

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi masalah, yaitu:

1. Latar belakang munculnya sistem Sibayak.
2. Penyebab penghapusan sistem Sibayak.
3. Dampak dari dihapusnya sistem Sibayak pada sistem pemerintahan masyarakat Karo

1.3. Batasan Masalah

Dikarenakan luasnya masalah yang harus dibahas, yaitu maka peneliti membatasi masalah kepada “ **Penghapusan Sistem Sibayak Pada Struktur Pemerintahan Masyarakat Suku Karo 1946-1947**”.

1.4. Rumusan masalah

1. Apakah latar belakang dari munculnya Sistem Sibayak di Tanah Karo?

2. Apa dampak dari dihapusnya sistem Sibayak pada masyarakat Karo ?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya sistem Sibayak di Tanah Karo
2. Untuk mengetahui dampak dari penghapusan sistem Sibayak pada sistem pemerintahan di Tanah Karo.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis, sebagai penambah sumber bacaan akan sejarah Suku Karo. Bagi lembaga Pendidikan,
2. sebagai suatu pengetahuan akan Sejarah Suku Karo dan sebagai sumber bacaan.
3. Bagi peneliti, sebagai suatu pengalaman dalam hal meneliti.

